



**PEMERINTAH
KABUPATEN BONE
KECAMATAN LAMURU**

#BERSAMARAKYAT
#KITAKUAT

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022



**RAMLI MARSUKI, .S.SOS.M.SI
CAMAT LAMURU**

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI (%)		PERSENTASE REALISASI (%)		EFISIENSI	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
										KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN				
1	Meningkatnya kualitas dan kualitas pelayanan publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Realisasi penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	7,796,236,851	100	7,804,752,941	100	100.11	- 0.11	(8,516,090)	Belum optimalnya Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	melakukan Rapat evaluasi kinerja secara berkala per triwulan dan melakukan pemangkasan dan pengoptimalan penggunaan anggaran dengan efisien
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	26,228,770	100	26,162,170	100	99.75	0.25	66,600	Belum Optimalnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perlu adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	1	26,228,770	1	26,162,170	100	99.75	0.25	66,600	Usulan Perencanaan terkadang terhambat oleh terlambatnya Ketersediaan Satuan standar harga yang menyebabkan penginputan sering mengalami kendala	Perlu adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	7,332,113,701	100	7,359,984,046	100	100.38	- 0.38	(27,870,345)	Terjadinya perubahan pagu anggaran yang signifikan	Perlu diadakan keseuaian pagu anggaran mengikuti anggaran perubahan daerah
					Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	Bulan	12	7,332,113,701	12	7,359,984,046	100	100.38	- 0.38	(27,870,345)	Sering terjadinya kelebihan Pagu anggaran	Perlu diadakan keseuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembalian
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100	16,800,000	100	16,800,000	100	100.00	-	-	-	Efisien
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	16,800,000	1	16,800,000	100	100.00	-	-	-	Efisien
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	1	38,050,000	1	38,050,000	100	100.00	-	-	-	Efisien

					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	20	38,050,000	20	38,050,000	100	100.00	-	-	-	Efisien
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai rencana kebutuhan	Persentase	100	117,905,900	100	113,659,412	100	96.40	3.60	4,246,488	Belum optimalnya Pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah	Memaksimalkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan administrasi umum dengan efektif dan efisien
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan alat Tulis kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Paket	1	14,064,500	1	13,686,100	100	97.31	2.69	378,400	Terkadang kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik	Meminimalkan penggunaan ATK pada Tahun Anggaran berikutnya dengan beralih kepada pemanfaatan digitalisasi
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan	Paket	2	45,815,750	2	43,558,209	100	95.07	4.93	2,257,541	Harga pada Aset berbeda dengan yang dilapanagn/pedagang	efektifitas penggunaan anggaran makan minum pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Paket	1	4,465,650	1	3,075,103	100	68.86	31.14	1,390,547	Penggandaan dokumen tersebar di beberapa sub kegiatan	memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah media yang dibayarkan sesuai rencana kebutuhan per bulan	Media	1	2,400,000	1	2,300,000	100	95.83	4.17	100,000	kurangnya minta baca terhadap bacaan perundang - undangan	Berlangganan bahan bacaan /koran yang kontinyu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti oleh aparat perangkat daerah	Kegiatan	45	51,160,000	45	51,040,000	100	99.77	0.23	120,000	Pemberian SPDP tidak menyeluruh di tiap Kepala seksi	perlu diadakan pembagian spdp pada semua kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentas Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase	100	18,375,000	100	18,375,000	100	100.00	-	-	-	Efisien
					Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	7	18,375,000	7	18,375,000	100	100.00	-	-	-	Efisien
					Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	137,954,880	100%	133,133,933	100	96.51	3.49	4,820,947	Kurang maksimalnya Pengelolaan penyediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Melakukan pemetaan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan urgensi kecamatan

					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket pembayaran jasa komunikasi jasa komunikasi bulanan (telepon/faximile, internet dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Rekening	36	21,916,080	36	19,328,233	100	88.19	11.81	2,587,847	Karena Adanya Jumlah Pemakaian Listrik Yang Tidak Menentu di setiap bulan, Akhirnya Mempengaruhi Jumlah Anggaran Yang Terpakai	Anggaran disiapkan sesuai i Mbps wifi nternet, listrik, dan air yang digunakan
					Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan bagi tenaga administrasi/tenaga teknis lainnya yang dipekerjakan yang dipekerjakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12	116,038,800	12	113,805,700	100	98.08	1.92	2,233,100	Adanya Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Honorer yang Pembayaran tidak Sesuai di Setiap Bulannya	Penyiapan dana untuk mempersiapkan perubahan biaya premi asuansi dalam perencanaan anggaran
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	108,808,600	100%	98,588,380	100	90.61	9.39	10,220,220	Kurang maksimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Melakukan pemetaan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan fokus pada kebutuhan sarana prasarana yang belum terpenuhi
					Penyediaan Jasa Pemeiharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Unit	1	48,260,000	1	43,018,259	100	89.14	10.86	5,241,741	Pemeliharaan Kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tentukan	perlu dilakukan koordinasi dengan aset terkait dengan biaya pemeliharaan kendaraan kepada aset
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	36,950,000	5	34,115,600	100	92.33	7.67	2,834,400	Pemeliharaan Kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tentukan	Diperlukan angaran pemeliharaan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai operasional kantor
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	14	7,900,000	14	6,097,521	100	77.18	22.82	1,802,479	Pemeliharaan Peralatan dan mesin terbatas dengan standar harga yang sudah ditentukan	Perlukan Pekerjaan yang lebih handel dalam melaksanakan perlatan kantor
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilkasnakan sesuai standar pelayanan	95%	100.3%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket	1	15,698,600	1	15,357,000	100	97.82	2.18	341,600	Pemeliharaan gedung kantor terbatas dengan standar harga yang sudah ditentukan	Pemeliharaan gedung kantor harus lebih maksimal demi kenyamanan dan kelancaran peayanan
					Program Penyelenggaran Pemerintah dan Pelayanan Publik	Cakupan Realisasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100%	15,950,000	100%	15,950,000	100	100.00	-	-	-	Efisien
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase	100%	15,950,000	100%	15,950,000	100	100.00	-	-	-	Efisien

					Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	Kegiatan	1	15,950,000	1	15,950,000	100	100	-	-	-	Efisien
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase	100%	156,500,000	100%	154,578,931	100	98.77	1.23	1,921,069	Belum terpenuhinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tepat waktu	Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100%	35,000,000	100%	33,078,931	100	94.51	5.49	1,921,069	Belum optimalnya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Diperlukan stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa
					Peningkatan Evektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilatah kecamatan	Jumlah peningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	1	35,000,000	1	33,078,931	100	94.51	5.49	1,921,069	Masih Kurangnya Kordinasi antar Desa sehingga Laporan Pokja Desa sering Terlambat yang mempengaruhi Keterlambatan Laporan FKKS dan TKSK	Perlu adanya Kordinasi dan Sinergitas antar Pokja Desa dan FKKS dalam Hal Penyusunan Laporan
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persen	100	121,500,000	100	121,500,000	100	100.00	-	-	-	Efisien
					Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Pembangunan saran dan prasarana Kelurahan	Kegiatan	3	121,500,000	3	121,500,000	100	100.00	-	-	-	Efisien

					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Persentase	100%	27,000,000	100%	23,400,000	100	86.67	13.33	3,600,000	Kordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum belum optimal	kerjasama, Kebersamaan, kekeluargaan dan kekompakan dengan Tripika perlu dipertahankan dan ditingkatkan
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Persentase	100%	27,000,000	100%	23,400,000	100	86.67	13.33	3,600,000	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman da ketertiban umum	Diharapkan pengawasan yang dilakukan sebaiknya disertai dengan pembinaan dan pembekalan pengetahuan
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengawasan Operasional Tripika	Kegiatan	36	27,000,000	36	23,400,000	100	86.67	13.33	3,600,000	Koordinasi Lintas Sektor masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengawasan yang lebih Komprehensif	Perlu Diadakan Rapat Kordinasi Lintas Sektor Secara Rutin dan Berkala

					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100%	14,464,850	100%	14,034,600	100	97.03	2.97	430,250	Belum sepenuhnya terpenuhi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	menjadwalkan Koordinasi dengan desa secara rutin/Berkala
					Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Realisasi dan koordinasi Penbinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	14,464,850	100	14,034,600	100	97.03	2.97	430,250	Belum Optimalnya Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahn Desa	Menjadwalkan Koordinasi dengan Desa secara rutin/berkala
					Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	Desa	11	14,464,850	11	14,034,600	100	97.03	2.97	430,250	masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa	perlu diadakan Bimbingan Teknis kepada para kepala para kepala desa dalam hal penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa

Labata, 20 Januari 2023



RAMLI MARSUKI, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembia